

Wakil Ketua II DPRD Buton Selatan Hasrul Saadi Harap Firman Hamza Lanjutkan Sinergi DPRD dan Pemda Busel Seperti Dilakukan La Ode Nurunani



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP - Pergantian Sekretaris DPRD Kabupaten Buton Selatan dari La Ode Nurunani kepada La Ode Firman Hamza diharapkan tidak mengganggu kesinambungan hubungan kerja antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Wakil Ketua II DPRD Busel, H. Hasrul Saadi, S.E., menilai kemampuan membangun komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting dari tugas sekretariat DPRD.

Hasrul mengatakan, Nurunani telah menjalankan tugas selama lima tahun delapan bulan sebelum digantikan dalam pelantikan terbaru. Selama masa tersebut, ia menilai Nurunani mampu memfasilitasi kebutuhan DPRD sekaligus menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. "Beliau luar biasa. Tugas-tugas seorang Sekretariat DPRD itu beliau paham betul.

Lanjut ke Hal: 7

Buton Tengah Siapkan Nomor 112, Respons Kegawatdaruratan Didorong Lebih Cepat



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, menyiapkan layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112 sebagai kanal terpadu untuk menerima laporan masyarakat terkait berbagai kondisi kegawatdaruratan. Layanan tersebut disosialisasikan bersama

Lanjut ke Hal: 7

Bapas Baubau Perkuat Bimbingan Klien Wajib Laporkan untuk Cegah Pelanggaran

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Baubau memperkuat pendampingan terhadap klien pemasarakatan melalui bimbingan individu bagi klien wajib lapor. Kegiatan yang berlangsung di ruang konseling Bapas Baubau, Rabu (16/9/2026), diarahkan untuk membantu klien menjaga perilaku, menaati norma sosial, dan menghindari pelanggaran hukum selama menjalani reintegrasi sosial.



Pembimbing Kemasarakatan (PK) Ahli Madya Bapas Baubau, Jamaluddin, dalam bimbingan

tersebut menggali perkembangan perilaku serta berbagai kendala yang dihadapi klien. Pendekatan secara interaktif dilaku-

kan agar pembimbing dapat mengetahui kondisi klien sekaligus memberikan arahan sesuai kebutuhan selama proses kembali ke lingkungan masyarakat.

Menurut Jamaluddin, kewajiban lapor tidak semata-mata berkaitan dengan penemuan administrasi. Pendampingan diperlukan untuk membangun kesiapan mental dan sosial klien agar mampu menjalani kehidupan secara

Lanjut ke Hal: 7

Pendidikan, Jalan dan PJU Jadi Aspirasi Warga Waliabuku dalam Reses Anggota DPRD Baubau Aswan Syaifudin



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Ke-butuhan pendidikan, perbaikan infrastruktur jalan, layanan kesehatan, dan penerangan jalan umum (PJU) menjadi aspirasi utama warga Waliabuku saat mengikuti reses Anggota DPRD Kota Baubau, Aswan Syaifudin, S.Si., Jumat (11/9/2026). Sejumlah usulan lain, termasuk pengadaan seragam majelis taklim, turut disampaikan untuk diteruskan kepada pemerintah daerah.

Aspirasi tersebut disampaikan warga karena sejumlah kebutuhan pembangunan

dinilai belum terakomodasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Aswan yang merupakan anggota DPRD Kota Baubau dari Partai PPP mengatakan, reses menjadi kesempatan bagi wakil rakyat untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan masyarakat sekaligus menghimpun usulan yang belum masuk dalam agenda pembangunan.

"Ini untuk menampung aspirasi masyarakat yang tidak terlaksana di Musrenbang kemarin. Jadi tugas kami langsung turun ke lapangan un-

tuk menampung aspirasi masyarakat," kata Aswan.

Dalam pertemuan itu, pendidikan dan infrastruktur, terutama jalan, menjadi perhatian warga. Kebutuhan PJU dan kesehatan juga masuk dalam daftar aspirasi yang disampaikan masyarakat. Menurut Aswan, berbagai usulan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan sehari-hari warga sehingga perlu disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dipertimbangkan dalam program pembangunan.

Lanjut ke Hal: 7

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP -Tiga siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Baubau berhasil melaju ke Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) tingkat Provinsi setelah mencatat prestasi pada seleksi tingkat kota. Ketiganya berasal dari dua bidang lomba, yakni Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS), dengan dua siswa meraih juara pertama dan satu lainnya juara ketiga.

Ketiga siswa tersebut adalah Uwais Al Qarni Banjar yang meraih Juara 1 bidang Matematika, Waode Qirani Arsyilia sebagai Juara 1 bidang IPAS, serta Raziq Hanan Ajudu yang meraih Juara 3 bidang IPAS. Hasil itu mengantarkan mereka menjadi wakil MIN 1 Baubau untuk berkompetisi pada jenjang provinsi.

Guru pembimbing MIN 1 Baubau, Delisa Lustika, S.Pd.,

Lanjut ke Hal: 7

Prestasi Akademik, Tiga Siswa MIN 1 Baubau Lolos OMI Provinsi

Dra. Yuliana Donggi Hanas, M.Pd.
Kepala MIN 1 Baubau

Juara 1
Uwais Al Qarni Banjar
Mapel Matematika

Juara 1
WA Ode Qirani Arsyilia
Mapel IPAS

Juara 3
Raziq Hanan Ajudu
Mapel IPAS

Tiga siswa berhasil lolos seleksi OMI tingkat kota.

Terdiri dari dua bidang lomba: Matematika dan IPAS.

Dua siswa meraih juara pertama dan satu juara ketiga.

Ketiganya akan mewakili MIN 1 Baubau di OMI tingkat Provinsi.

Dibimbing secara intensif oleh guru dan didukung seluruh warga madrasah.

Prestasi ini menjadi bukti ketekunan, kerja keras, dan semangat belajar siswa.

Zulhas Bercanda ke Bahlil, Jadi Ketum Saja Berat, Apalagi Menjadi Presiden, Biar Prabowo Saja



Prabowo hadiri HUT PAN.

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas melontarkan candaan kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai beratnya menjadi pemimpin partai hingga presiden dalam perayaan HUT ke-28 PAN di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (18/9) malam. Gurauan itu disambut tawa peserta dan acungan jempol Bahlil.

Candaan tersebut muncul ketika Zulhas berbicara mengenai dinamika kepemimpinan partai politik. Ia mengatakan posisi ketua umum saja sudah memiliki tanggung jawab besar, apalagi jika seseorang harus memimpin sebagai presiden. Zulhas kemudian mengarahkan pernyataannya kepada Bahlil yang berada di lokasi acara.

“Pak Bahlil, jadi ketum ini berat juga. Ketum partai berat. Apalagi jadi presiden, apalagi presiden. Saya kira Pak Bahlil sama saya sepakat,” ujar Zulhas.

Zulhas kemudian menyebut nama Presiden Prabowo Subianto. “Presiden biar Pak Prabowo saja ya, Pak. Cocok?” katanya. Bahlil merespons dengan mengacungkan jempol, sedangkan Prabowo yang hadir

dalam acara tersebut mengangkat tangan ke arah depan sembari tersenyum tipis.

Gurauan itu kemudian berlanjut ketika Zulhas menyinggung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia mengatakan dirinya bersama Bahlil kemungkinan tidak maju dalam kontestasi calon presiden, sementara Cak Imin masih mempertimbangkan kemungkinan tersebut. Cak Imin pun tertawa dan mengangkat tangan ke dada merespons candaan itu.

“Bedanya sedikit, Pak Bahlil bersama saya mungkin enggak nyapres, kalau Pak Muhaimin masih mikir-mikir, Pak,” kata Zulhas.

Nama Presiden PKS Al Muzammil Yusuf juga masuk dalam rangkaian gurauan Zulhas. Ia menyebut Muzammil sudah menjadi ‘presiden’ di lingkungan partainya sehingga, dalam konteks candaan tersebut, cita-cita menjadi presiden telah terwujud.

Di luar suasana ringan tersebut, Zulhas juga menyinggung pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Sejumlah partai koalisi pemerintah sebelumnya disepakati angka 5 persen, atau naik dibandingkan ambang batas 4 persen yang berlaku pada Pemilu 2019 dan

2024.

Zulhas mengatakan PAN akan mengikuti keputusan yang disepakati bersama oleh partai-partai politik. Namun, ia menekankan keputusan tersebut harus ditempuh melalui musyawarah dan mufakat.

“Ya, kita kan koalisi ya dengan teman-teman Gerindra dan lain-lain. Yang penting musyawarah mufakat. Kami apa saja kalau disepakati, kami ikut. Termasuk soal PT (parliamentary threshold), kami ikut. Tapi harus ada kesepakatan kebersamaan,” ujar Zulhas kepada wartawan.

Pembahasan ambang batas parlemen berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 29 Februari 2024. Perkara tersebut diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK menyatakan ketentuan ambang batas parlemen 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu 2024, tetapi memerintahkan pembentuk undang-undang melakukan perubahan untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya.

Secara historis, Indonesia telah beberapa kali mengubah besaran ambang batas par-

lemen. Pada Pemilu 2009 angkanya 2,5 persen, kemudian 3,5 persen pada Pemilu 2014, sebelum meningkat menjadi 4 persen mulai Pemilu 2019. Perubahan tersebut menjadi bagian dari perdebatan panjang mengenai penyederhanaan sistem kepartaian dan keterwakilan suara pemilih.

Perdebatan mengenai ambang batas parlemen juga dikenal dalam sistem politik negara lain. Jerman, misalnya, menerapkan ambang batas 5 persen dalam pemilihan Bundestag. Ketentuan tersebut menjadi salah satu instrumen dalam sistem pemilu Jerman untuk mengatur keterwakilan partai di parlemen.

Rangkaian pernyataan Zulhas di HUT PAN akhirnya mempertemukan dua isu berbeda dalam satu panggung: candaan mengenai kemungkinan kontestasi kepemimpinan nasional dan pembahasan serius mengenai desain sistem pemilu. Sementara candaan tentang Bahlil, Cak Imin, dan Prabowo mencairkan suasana, isu ambang batas parlemen berkaitan langsung dengan konfigurasi partai politik dan keterwakilan di DPR pada pemilu mendatang. (*)

21 Bulan Memimpin, Prabowo Sebut 121 Masalah Negara Telah Ditangani



Presiden RI Prabowo Subianto mengaku kaget sudah ada sekitar 121 permasalahan yang diselesaikan dalam waktu sekitar 21 bulan kepemimpinannya.

Laporan: Radit

JAKARTA, BP- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan masa pemerintahannya. Evaluasi tersebut mencakup berbagai persoalan nasional yang dinilai telah berlangsung selama bertahun-tahun, termasuk pengelolaan kekayaan alam dan penataan badan usaha milik negara (BUMN).

Prabowo menyampaikan hal itu dalam program Presiden Prabowo Menjawab, Jumat (18/9). Ia mengaku sempat terkejut ketika menerima laporan dari staf mengenai jumlah persoalan yang telah ditangani pemerintah dalam periode kurang dari dua tahun tersebut.

“Kita pun kaget, waktu saya dilaporkan oleh staf saya, Pak, kita sudah kerja ini kurang dari dua tahun, kalau tidak salah waktu itu 21 bulan, ini lho, kita sudah selesaikan 121 masalah,” kata Prabowo.

Dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Prabowo juga menyebut 121 kebijakan transformatif telah dijalankan selama 663 hari pemerintahan. Menurut pemerintah, kebijakan tersebut mencakup persoalan yang sebagian telah berlangsung selama puluhan tahun.

Salah satu agenda yang disoroti Prabowo adalah upaya mengatasi kebocoran kekayaan alam. Ia menegaskan pengelolaan sumber daya Indonesia harus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas, bukan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Persoalan tersebut

ditempatkan dalam agenda transformasi ekonomi yang lebih besar. Pemerintah sebelumnya menyatakan kebijakan transformasi diarahkan untuk mengubah kekayaan alam Indonesia menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di sektor BUMN, pemerintah juga melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan negara yang dinilai tidak produktif. Dalam pidato kenegaraan Agustus 2026, Prabowo menyebut pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara menjadi paling banyak 300 pada akhir Desember 2026. Pemerintah menyatakan lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam proses penataan tersebut.

“Dan nanti Desember minimal 750 [BUMN ditutup], minimal,” ujar Prabowo dalam program tersebut.

Menurut pemerintah, penataan dilakukan setelah ditemukan 1.074 BUMN, termasuk struktur anak, cucu, hingga cicit perusahaan. Dari restrukturisasi yang telah berjalan, pemerintah menyebut penghematan biaya overhead telah mencapai lebih dari Rp50 triliun dan ditargetkan meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026.

Secara historis, keberadaan BUMN berkaitan erat dengan proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda setelah Indonesia merdeka. Pemerintah kemudian membangun kerangka perusahaan negara melalui UU Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

Pada 1969, perusahaan negara diklasifikasikan antara lain menjadi Perjan, Perum, dan Persero, sebelum Kementerian BUMN terbentuk pada era reformasi 1998.

Penataan perusahaan negara bukan fenomena yang hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara, reformasi badan usaha milik negara berkembang seiring perubahan kebijakan ekonomi, terutama sejak gelombang liberalisasi dan privatisasi pada akhir abad ke-20. Indonesia sendiri pernah membuka lebih luas ruang investasi asing pada era Orde Baru, sementara sejumlah BUMN mulai mencatatkan sahamnya di bursa pada dekade 1990-an.

Bagi pemerintahan Prabowo, restrukturisasi BUMN ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memastikan perusahaan negara memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Pemerintah menyatakan hanya perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah yang akan dipertahankan.

Prabowo juga menegaskan evaluasi 21 bulan tersebut bukan alasan bagi pemerintah untuk berhenti bekerja. Dalam pidato kenegaraan, ia menyatakan masih banyak persoalan nasional yang harus diselesaikan. Pemerintah, menurut dia, akan melanjutkan kebijakan transformasi dengan orientasi pada kepentingan masyarakat dan generasi mendatang. (*)

Lahan Eks PT Kapas Terlantar, Gubernur Sultra ASR Dorong Kepastian Status Hukum



Laporan: Mashuri

JAKARTA, BP-Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menuntaskan dokumen penataan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Kapas di Sulawesi Tenggara. Desakan itu muncul setelah Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengungkapkan lahan seluas 2.393 hektare tersebut masih menjadi persoalan dengan masyarakat meski perusahaan pemegang HGU telah bubar.

Persoalan itu dibahas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, serta para gubernur se-Indonesia di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Para bupati dan wali kota mengikuti rapat tersebut secara daring.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Kar-sayuda mengatakan persoalan aset negara, termasuk aset BUMN yang terkait dengan HGU, menghadapi mekanisme penghapusan yang panjang. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat membuat

lahan yang semes-tinya segera ditata justru berlarut dalam persoalan administrasi dan hukum.

“Aturan kita bikin ribet sendiri. Untuk menghapus aset BUMN saja harus melalui sidang paripurna DPR RI,” kata Rifqinizamy dalam rapat tersebut.

Kasus eks PT Kapas menjadi salah satu contoh yang disampaikan dalam forum itu. Menurut Andi Sumangerukka, perusahaan yang berada di bawah PT Berdikari (Danan-tara) tersebut telah beroperasi sejak 1996, tetapi kini sudah bubar. Sementara lahan HGU seluas 2.393 hektare yang ditinggalkan kemudian memicu perse-lisihan dengan masyarakat setempat.

Pemprov Sultra, kata Andi, telah hampir satu tahun mem-fasilitasi penyelesaian persoalan itu. Pemerintah daerah juga mendatangi Danantara dan mendapat penjelasan bahwa perusahaan tersebut telah bubar serta aset dimaksud tidak lagi tercatat dalam pembukuan perusahaan.

“Kami sudah hampir satu tahun memfasilitasi ini. Kami mendatangi Danantara dan dikonfirmasi bahwa perusahaan sudah bubar serta tidak lagi mencatatkan aset tersebut,” ujar Andi.

Pemprov Sultra kemudian berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status lahan. Namun, hingga rapat berlangsung, pemerintah daerah belum memperoleh kepastian mengenai status tanah tersebut. Bagi Pemprov Sultra, kejelasan status lahan diperlukan bukan hanya untuk meredam perselisihan dengan warga, tetapi juga karena terdapat rencana pemanfaatannya untuk pembangunan fasilitas pertahanan di daerah.

“Kami berharap lahan tersebut diserahkan ke pemerintah daerah agar pemanfaatannya jauh lebih maksimal ketimbang ditarik kembali ke pusat,” kata Andi.

Persoalan tersebut berlangsung dalam konteks sejarah panjang penataan tanah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan utama hukum agraria nasional dan sejak ditetapkan pada 24 September 1960 mengatur, antara lain, hak atas tanah termasuk HGU. UUPA juga menetapkan kepastian hukum pertanahan

dan fungsi sosial tanah sebagai bagian penting dalam sistem agraria nasional.

Dalam perkembangan kebijakan agraria, pemerintah juga menetapkan reforma agraria sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta menangani sengketa dan konflik agraria. Perpres Nomor 86 Tahun 2018 secara eksplisit memasukkan penanganan sengketa dan konflik agraria sebagai salah satu tujuan reforma agraria. Pada September 2026, DPR juga tengah membahas RUU Reforma Agraria yang antara lain diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum dan kelembagaan penyelesaian konflik agraria.

Menutup pembahasan, Ketua Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN tidak menunda penyelesaian ber-kas penataan lahan eks PT Kapas. Ia menyarankan dokumen penataan tersebut segera diserahkan kepada Gubernur Sultra agar proses penyelesaian dan pemanfaatan lahan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan. (*)

BBM Bersubsidi Langka, Pemkot Kendari Bergerak Tertibkan Penjualan Eceran



Laporan: Lisna

KENDARI, BP-Pemerintah Kota Kendari berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengupayakan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah kelangkaan yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Persoalan itu menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi di Kantor Balai Kota Kendari, Kamis (17/9/2026).

Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan BBM bersubsidi sekaligus mencegah penyalahgunaan distribusi. Langkah tersebut antara lain penertiban penjualan BBM bersubsidi secara eceran yang kembali dijual dengan harga non-subsidi.

Menurut Sudirman, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap praktik pembelian BBM secara berulang. Penggunaan kendaraan atau tangki berkapasitas besar yang berpotensi memengaruhi ketersediaan BBM bagi masyarakat turut menjadi perhatian dalam pengawasan tersebut.

“Pemerintah juga akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik pembelian BBM secara berulang dan penjualan kembali secara eceran,” kata Sudirman.

Aspirasi mahasiswa berangkat dari kondisi antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di Kendari. Massa menilai antrean tersebut mengganggu aktivitas warga dan berpotensi menimbulkan kemacetan pada sejumlah ruas jalan.

Mereka meminta pemerintah tidak hanya merespons persoalan melalui dialog, tetapi mengambil kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam dialog itu, mahasiswa juga mengusulkan alternatif pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat, seperti sistem ganjil-genap yang diterapkan di sejumlah daerah. Selain persoalan BBM, mereka menyampaikan isu lain yang berkaitan dengan infrastruktur, lingkungan, dan tata ruang Kota Kendari.

Sudirman menerima aspirasi tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan dan Asisten I Setda Kota Kendari Adriana Musarudin. Pemerintah menyatakan terbuka terhadap masukan masyarakat dan mahasiswa, tetapi penangan persoalan BBM membutuhkan koordinasi lintas pihak serta dukungan masyarakat.

“Kami terbuka terhadap masukan dan rekomendasi masyarakat maupun mahasiswa,” ujar Sudirman.

Pemerintah Kota Kendari meminta waktu untuk menindaklanjuti langkah penertiban serta koordinasi dengan Pertamina. Penambahan kuota BBM bersubsidi diharapkan dapat membantu mengurangi antrean di SPBU, sementara pengawasan di-tujukan agar BBM bersubsidi tetap tersalurkan sesuai peruntukannya.

Secara nasional, persoalan distribusi BBM bersubsidi bukan isu baru. Pemerintah Indonesia se-

lama bertahun-tahun menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, pengendalian konsumsi, dan pencegahan penyalahgunaan subsidi. Penyaluran BBM bersubsidi karena itu tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga tata kelola distribusi dari tingkat pemasok hingga konsumen.

Secara historis, subsidi energi juga menjadi persoalan di berbagai negara. Lonjakan harga minyak dunia pada dekade 1970-an, yang dikenal sebagai krisis minyak global, mendorong banyak negara menata ulang kebijakan energi dan memperkuat pengendalian konsumsi. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa gangguan pasokan dan peningkatan permintaan dapat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat.

Bagi Kendari, persoalan yang muncul pada September 2026 kini berada pada dua sisi: memastikan pasokan BBM bersubsidi mencukupi kebutuhan masyarakat dan memperketat pengawasan agar distribusinya tidak terganggu oleh pembelian berulang maupun penjualan kembali secara eceran. Pemerintah Kota Kendari dan Pertamina akan menjadi pihak yang menentukan tindak lanjut teknis, sementara masyarakat menunggu penyelesaian antrean yang mengganggu aktivitas sehari-hari. (*)

Pangdam Hasanuddin Singgah di Buton, Tradisi Manca-Mangaru Jadi Penyambut



Pewarta: La Harman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton memanfaatkan persinggahan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko di Pelabuhan Banabungi, Pasarwajo, Rabu pagi, 16 September 2026, untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah. Rombongan yang dalam perjalanan menuju Kabupaten Wakatobi itu disambut pertunjukan tradisional Manca dan Mangaru.

Penyambutan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Buton La Ode Syamsudin, S.Pd., M.Si., yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati Buton. Ia bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kedatangan Pangdam beserta Ny. Renny Wahyunie Nawoko dan rombongan.

Pertunjukan Manca dan Mangaru ditempatkan sebagai bagian dari prosesi penerimaan tamu. Selain menjadi penghormatan, kesenian tradisional tersebut digunakan untuk memperke-

nalkan identitas masyarakat Buton kepada Pangdam XIV/Hasanuddin dan rombongan.

“Penyambutan ini menjadi bagian dari penghormatan sekaligus memperkenalkan tradisi dan budaya masyarakat Buton kepada tamu daerah,” demikian makna yang disampaikan melalui rangkaian prosesi penyambutan tersebut.

Kehadiran unsur Forkopimda dalam agenda itu juga memperlihatkan ruang pertemuan antara pemerintah daerah dan jajaran TNI dalam menjaga komunikasi serta koordinasi di wilayah. Silaturahmi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung hubungan kerja pemerintahan dan keamanan daerah.

Setelah prosesi penyambutan berlangsung, Sekda Buton bersama jajaran Forkopimda mengantar Pangdam XIV/Hasanuddin dan rombongan menuju keberangkatan dari Pelabuhan Banabungi. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Wakatobi.

Persinggahan tersebut berlangsung dalam rangkaian perjalanan Pangdam XIV/Hasanuddin menuju Wakatobi. Meski bersifat singgah, agenda itu dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Buton untuk membangun komunikasi langsung dengan jajaran TNI.

“Silaturahmi dan komunikasi antarlembaga perlu terus dijaga agar koordinasi di daerah berjalan baik,” menjadi pesan yang tercermin dalam agenda pertemuan tersebut.

Secara historis, tradisi penyambutan dengan kesenian bukan hal baru dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Kesenian tradisional sejak masa kerajaan hingga perkembangan pemerintahan modern kerap digunakan dalam berbagai upacara penerimaan tamu sebagai simbol penghormatan sekaligus penanda identitas komunitas.

Di Buton, tradisi budaya berkembang seiring sejarah Kesultanan Buton yang berdiri sejak abad ke-16 dan

kemudian menjadi salah satu pusat pemerintahan serta perdagangan penting di kawasan timur Nusantara. Warisan budaya tersebut hingga kini tetap menjadi bagian dari identitas masyarakat daerah.

Dalam konteks yang lebih luas, penggunaan seni tradisional sebagai sarana diplomasi budaya juga dikenal di berbagai negara. Indonesia sendiri menjadikan keragaman budaya sebagai salah satu instrumen diplomasi kebudayaan untuk memperkenalkan identitas bangsa dalam hubungan internasional.

Bagi Pemerintah Kabupaten Buton, penyambutan Pangdam XIV/Hasanuddin dengan Manca dan Mangaru tidak sekadar menjadi rangkaian seremoni. Agenda tersebut sekaligus menjadi ruang memperkuat silaturahmi antara pemerintah daerah, TNI, dan Forkopimda sembari menunjukkan keberadaan tradisi lokal dalam kehidupan masyarakat Buton. (*)

RDTR-KLHS Buton Utara Disusun, Bupati Afirudin Tekankan Satu Data Satu Peta



Laporan: Ardi

BURANGA, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mulai menyusun instrumen tata ruang yang ditujukan untuk memberi kepastian pemanfaatan wilayah sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Langkah itu ditandai dengan pembukaan Focus Group Discussion (FGD) I penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) oleh Bupati Buton Utara Afirudin Mathara, S.H., M.H., di Aula Hotel Sara'ea, Selasa (15/9/2026).

Penyusunan kedua dokumen tersebut dipandang penting karena akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan pemanfaatan ruang, pembangunan infrastruktur, pengembangan permukiman, investasi, hingga pengelolaan sumber daya alam di Buton Utara. Pemerintah daerah ingin dokumen yang dihasilkan tidak berhenti sebagai persyaratan administratif, tetapi dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Afirudin meminta penyusunan RDTR dan KLHS bertumpu pada data yang akurat serta kondisi faktual wilayah. Menurut dia, delineasi kawasan dan pemetaan isu strategis harus mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi daerah, serta kebutuhan masyarakat agar kebijakan tata ruang tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“RDTR dan KLHS harus menjadi instrumen untuk menentukan arah pembangunan wilayah, perlindungan lingkungan, pengembangan permukiman, infrastruktur, investasi, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan,” kata Afirudin.

Ia juga menekankan perlunya integrasi

lintas sektor dalam proses penyusunan dokumen. Organisasi perangkat daerah diminta mengesampingkan ego sektoral dan memastikan setiap data sektoral yang disediakan memiliki tingkat akurasi serta dapat dipertanggungjawabkan.

Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi perhatian lain pemerintah daerah. Kawasan hutan, pesisir, mangrove, pertanian, perikanan, pariwisata, dan kawasan ekologis penting lainnya, kata Afirudin, harus tetap dijaga sembari dikelola secara optimal agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai pembangunan mengorbankan lingkungan, tetapi potensi yang ada juga harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan tata ruang di Indonesia yang semakin menempatkan aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan. Secara historis, pengaturan penataan ruang nasional berkembang melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sementara itu, KLHS memperoleh posisi penting dalam kebijakan lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara global, gagasan mengintegrasikan pembangunan dengan perlindungan lingkungan menguat setelah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Manusia di Stockholm pada 1972. Perkembangan berikutnya melahirkan

konsep pembangunan berkelanjutan yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan perlindungan lingkungan. Prinsip tersebut kemudian semakin luas melalui Agenda 21 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam konteks Buton Utara, Bupati berharap pelibatan masyarakat, tokoh lokal, akademisi, dan dunia usaha dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kebutuhan serta potensi wilayah. RDTR dan KLHS diharapkan menghasilkan dokumen yang realistis dan operasional, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat, mendukung pembangunan infrastruktur dan investasi, serta menjadi pijakan pembangunan untuk 10, 20 hingga 30 tahun mendatang.

“Semangatnya adalah satu data, satu peta, satu arah pembangunan untuk Buton Utara,” kata Afirudin.

FGD tersebut diikuti secara daring oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Rahma Julianti beserta jajaran dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadir pula Sekretaris Daerah Buton Utara Muh. Hardhy Muslim, S.H., M.Si., para pimpinan dan jajaran OPD, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara, Tim Supervisi dan Project Management Unit (PMU), Tim Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP), tim konsultan penyusunan materi teknis dan rancangan peraturan kepala daerah RDTR Kabupaten Buton Utara, para camat, kepala desa dan lurah, tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta peserta FGD secara luring dan daring. (*)

BPOM Pacu Transformasi SDM Berbasis AI Menuju Indonesia Emas 2045



Peliput: Andina L

JAKARTA, BP-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meluncurkan empat aplikasi berbasis kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk memperkuat pengelolaan sumber daya manusia (SDM), sekaligus merespons keterbatasan jumlah pegawai di tengah bertambahnya mandat pengawasan. Transformasi tersebut menjadi bagian dari strategi BPOM membangun SDM berkelas menuju Indonesia Emas 2045.

Empat aplikasi yang diperkenalkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) SDM BPOM pada Selasa (18/8/2026) itu ialah Mentari AI, KIRA AI, SIMAKIN AI, dan KARFIS. Peluncuran dilakukan di Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta, dalam Rakornas bertema “Transformasi Manajemen SDM Berbasis AI: Membangun SDM Berkelas Menuju Indonesia Emas 2045” yang berlangsung selama dua hari.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pemanfaatan teknologi menjadi penting karena jumlah pegawai yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan organisasi. BPOM saat ini memiliki sekitar 6.431 pegawai, sedangkan kebutuhan organisasi mencapai sekitar 10.710 pegawai atau tingkat ketercukupan baru sekitar 60 persen.

Pada saat yang sama, BPOM mendapat penugasan dalam Program Makan Bergizi Gratis yang mencakup sekitar 32 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mendukung 83 ribu Koperasi Desa Merah Putih, dan memperkuat pengawasan sekitar 4,3 juta UMKM.

“Kalau kami tidak punya kemampuan daya tangkal, kemampuan siber, tidak punya kemampuan artificial intelligence dan sebagainya, kita tentu akan kalang kabut,” kata Taruna, merujuk pada temuan sekitar 1,3 juta tautan daring yang tidak sesuai ketentuan pada tahun sebelumnya.

Transformasi itu sekaligus memerlukan penerapan sistem merit dan manajemen talenta yang telah dikembangkan BPOM. Mentari AI digunakan untuk mengolah data talenta menjadi wawasan strategis guna menemukan potensi terbaik, KIRA AI untuk menelusuri regulasi dan kebijakan internal, SIMAKIN AI untuk mendukung Manajemen Kinerja Terintegrasi, sedangkan KARFIS diarahkan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan karier jabatan fungsional.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi sistem manajemen talenta BPOM yang telah berjalan sejak 2021. Dari sekitar 4.026 talenta yang diproses BKN, sebanyak 3.972 telah disetu-

jui dan seluruh talenta yang diajukan BPOM memenuhi persyaratan. “BPOM itu 100 persen disetujui. Ini artinya secara sistem memang sudah memenuhi syarat,” ujar Zudan.

Menteri PANRB Rini Widyantini menilai capaian tata kelola BPOM menjadi modal dalam menghadapi perubahan birokrasi. Indeks pelayanan publik BPOM tercatat 4,8 dari skala 5, di atas rata-rata nasional. BPOM juga telah hadir di 154 dari 313 Mal Pelayanan Publik (MPP). “Ukuran keberhasilan birokrasi ini sekarang sudah bergeser dari sekadar kepatuhan kepada prosedur menjadi kemampuan pemerintah untuk bisa memberikan layanan dengan kemudahan akses,” kata Rini.

Perubahan tersebut berlangsung dalam konteks perkembangan teknologi pemerintahan yang semakin cepat. Di Indonesia, agenda transformasi digital pemerintahan menguat seiring penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sementara secara global pemanfaatan AI mulai masuk ke berbagai fungsi organisasi, termasuk analisis data, pengembangan talenta, dan pengambilan keputusan administratif. Perkembangan itu membuat kebutuhan terhadap kompetensi digital aparatur semakin besar.

Penggunaan AI dalam manajemen aparatur juga perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola. Taruna menegaskan AI bukan pengganti manusia, melainkan instrumen untuk mening-

katkan objektivitas dan efektivitas pengelolaan SDM. “Dengan pemanfaatan sistem meritokrasi BPOM yang berbasis sumber daya manusia dengan menggunakan artificial intelligence, artinya objektivitas semakin ditingkatkan,” ujarnya.

Rakornas yang bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM itu juga membahas aspek nonteknologi. Sejumlah narasumber membahas kepemimpinan transformatif, sistem merit, transformasi digital ASN, kesehatan mental lintas generasi, produktivitas, dan strategi human capital berbasis AI. Materi antara lain disampaikan Ignatius Jonan, Katmoko Ari Sambodo, Fahmi Alusi, Wahyu Firdaus, Ferlita Sari, Irsyad Sahroni, Pascal Gerardus Angriawan, dan Sekretaris Utama BPOM Jayadi.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, BPOM mencanangkan Center of Excellence Budaya Integritas (CoEBI) melalui penyerahan tiga buku seri pustaka kepada Menteri PANRB. Kepala BKN juga menyerahkan penghargaan kepada Kepala BPOM atas pencapaian skor arsip ASN peringkat pertama di lingkungan instansi pemerintah pusat periode semester I 2026. Hasil Rakornas kemudian diarahkan menjadi landasan untuk membangun manajemen SDM BPOM yang adaptif, berbasis data dan AI, tetapi tetap menempatkan manusia sebagai pusat transformasi.(*)

Kemenkes Percepat Respons Hoaks Kesehatan, 2.622 Disinformasi Terdeteksi

Peliput: Prasetyo M

JAKARTA, BP-Kementerian Kesehatan memperkuat mekanisme penanganan disinformasi kesehatan setelah pemerintah mencatat 2.622 hoaks kesehatan beredar di berbagai platform digital sepanjang Agustus 2018 hingga September 2026. Penguatan dilakukan melalui peluncuran Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan untuk mempercepat identifikasi, koordinasi, dan penyampaian informasi berbasis bukti kepada masyarakat.

Langkah tersebut menjadi penting karena informasi keliru tidak berhenti pada pembentukan opini, tetapi berpotensi memengaruhi keputusan kesehatan masyarakat. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan hoaks dapat mendorong seseorang mengambil tindakan yang keliru dan berujung pada dampak kesehatan yang serius. “Hoaks ini tidak hanya memengaruhi pemahaman atau opini, tapi juga sudah membuat orang membuat keputusan yang salah dan bertindak yang salah,” kata Aji.

Kemenkes mengaitkan persoalan tersebut dengan penurunan cakupan imunisasi nasional dalam beberapa tahun terakhir. Data Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes menunjukkan cakupan imunisasi turun dari 95 persen pada 2023 menjadi 87 persen pada 2024 dan kembali menjadi 80 persen pada 2025. Untuk membangun perlindungan masyarakat, cakupan imunisasi minimal 90-95 persen dibutuhkan secara universal dan merata hingga tingkat kabupaten/kota.

Dampaknya terlihat dari munculnya kembali sejumlah penyakit yang sebelumnya dapat dikendalikan melalui imunisasi. Sepanjang 2025 hingga 2026, Kemenkes mencatat wabah atau kejadian

luar biasa campak di sejumlah daerah yang menyebabkan 72 anak meninggal dunia. Polio yang dapat menimbulkan lumpuh layu akut juga kembali ditemukan di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur setelah kekebalan masyarakat terhadap penyakit tersebut menurun.

Dalam konteks sejarah kesehatan masyarakat, imunisasi telah menjadi salah satu intervensi kesehatan paling penting untuk mengendalikan penyakit menular. Secara global, vaksinasi berperan dalam keberhasilan pemberantasan cacar yang dinyatakan eradikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 1980. Indonesia sendiri kemudian mencanangkan program imunisasi nasional secara bertahap, termasuk melalui Program Pengembangan Imunisasi (PPI) yang diperkenalkan pada 1977 sebagai bagian dari upaya memperluas perlindungan anak.

Namun, perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru. Penyebaran informasi kesehatan melalui media sosial memungkinkan sebuah klaim yang tidak benar beredar jauh lebih cepat dibandingkan pola komunikasi kesehatan konvensional. Komdigi mencatat isu imunisasi menjadi salah satu topik kesehatan dengan jumlah hoaks tertinggi, selain informasi mengenai tuberkulosis, air susu ibu, vitamin, dan suplemen imunitas tubuh.

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dante Saksono Harbuwono mengatakan pola penanganan yang selama ini dilakukan secara ad hoc perlu diubah menjadi sistem yang memiliki alur kerja jelas. Pernyataan itu disampaikan saat mere-smikan Playbook Penanganan Hoaks Kesehatan dalam Lokakarya Penanganan Hoaks Kesehatan Nasional di Auditorium Dr. J. Leimena, Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta, Kamis (17/9/2026). “Playbook ini adalah instrumen untuk

mewujudkan cara kerja yang lebih terstruktur, dari yang selama ini masih ad hoc menjadi mekanisme,” ujar Dan-te.

Melalui sistem baru tersebut, Kemenkes memperkuat regulasi dan tata kelola, koordinasi lintas sektor, serta pengembangan kanal penanganan hoaks yang terintegrasi dengan Halo Kemenkes. Kemenkes juga bekerja sama dengan Komdigi dan Pokja RCCE untuk memetakan peran setiap kementerian dan lembaga, termasuk pembagian tugas, target hasil, waktu pelaksanaan, dan standar operasional prosedur.

Kemenkes juga menyiapkan microsite yang akan memiliki dua fungsi. Pada sisi hulu, masyarakat dapat melaporkan informasi yang diduga hoaks. Pada sisi hilir, masyarakat dapat memperoleh artikel dan konten terkini yang telah diverifikasi oleh tim respons. “Kami sudah menyiapkan, juga memetakan peran lintas fungsi di kementerian atau lembaga, termasuk di internal, siapa melakukan apa dan hasilnya seperti apa, berapa lama, dan seterusnya, termasuk SOP-nya,” kata Aji.

Menurut Kemenkes, perlindungan masyarakat tidak cukup hanya melalui pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, dan vaksinasi. Pemerintah juga perlu memastikan informasi kesehatan disampaikan secara komunikatif, humanis, dan mudah dipahami agar masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan bukti ilmiah. Masyarakat karena itu diimbau memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai atau menyebarkannya.

Penguatan sistem tersebut menempatkan penanganan hoaks sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan mekanisme yang lebih terstruktur, Kemenkes berharap respons terhadap disinformasi dapat dilakukan secara cepat dan terukur sekaligus mengurangi risiko keputusan kesehatan yang keliru.(*)

PT FAREN GRAFIKA KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi	Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman	Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin	Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana	Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: La Harman Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks
				Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nusron Akhirnya Muncul Dan Nyatakan Hormati Penyidikan KPK, Kasus HGB Summarecon Jadi Sorotan ATR/BPN



Laporan: Amran

JAKARTA, BP - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya memberikan tanggapan atas penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK dan menyatakan kementeriannya akan kooperatif selama penyidikan berlangsung.

Pernyataan tersebut disampaikan Nusron di Jakarta, Jumat (18/9/2026), setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Perkara itu berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Nusron mengatakan proses hukum yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut harus dihormati. Ia juga menyatakan ATR/BPN akan membantu penyidik untuk mengungkapkan perkara sesuai kewenangan hukum yang berlaku.

"Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini," kata Nusron.

Kasus tersebut

turut menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta. Delapan tersangka yang diumumkan KPK ialah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta. Empat tersangka lainnya ialah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

KPK menyebut empat nama terakhir diduga merupakan orang yang dipercayakan Nusron. Namun, penyebutan tersebut merupakan bagian dari keterangan dan konstruksi perkara yang sedang dialami penyidik. Status hukum Nusron sendiri tidak berubah berdasarkan informasi tersebut, sementara kemungkinan pemeriksaan terhadap dirinya bergantung pada kebutuhan penyidikan KPK.

M e n a n g a p i penyebutan namanya dalam perkara tersebut, Nusron tidak memberikan kesimpulan mengenai mahali penyidikan. Ia memilih menunggu proses resmi KPK dan menyerahkan penanganan perkara kepada aparat pen-

egak hukum.

"Kami ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai aparat penegak hukum," ujarnya.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK pada 17 September 2026 menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, antara lain ruang Lampri, Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara. KPK menyatakan ruang kerja Nusron tidak termasuk lokasi yang digeledah.

Bagi Nusron, perkara tersebut juga harus menjadi titik evaluasi internal. Ia berharap proses hukum dapat mendorong percepatan pembenahan pelayanan pertanahan sehingga tata kelola di kantor-kantor pertanahan semakin transparan dan akuntabel.

"Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor pertanahan," kata Nusron.

Pemberantasan korupsi sendiri memiliki perjalanan panjang dalam sistem hukum Indonesia. KPK dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 setelah sebelumnya terdapat

landasan kebijakan reformasi antikorupsi melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Di tingkat internasional, pemberantasan korupsi juga berkembang menjadi agenda lintas negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengembangkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang kemudian disepakati pada 2003. Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani konvensi tersebut pada 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko, sebelum meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Kerangka itu menempatkan kerja sama, pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan aset sebagai bagian penting dalam pemberantasan korupsi.

Kasus dugaan suap pengurusan HGB di Bogor kini masih berada dalam proses penyidikan. KPK masih menelusuri rangkaian perkara dan kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang diperoleh. Sementara itu, Nusron menyatakan pelayanan pertanahan harus tetap berjalan dan proses hukum dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola di lingkungan ATR/BPN. (*)

ASN PPPK Bandung Tanam 73 Pohon Ganja di Rumah, Delapan Siap Panen



Ilustrasi tanaman ganja.

Laporan: Hadi

BANDUNG, BP- Sebanyak 73 pohon ganja ditemukan polisi di belakang rumah seorang aparat sipil negara (ASN) berinisial AS (49) di Kompleks Bumi Oranye, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Delapan di antaranya telah berusia sekitar lima bulan dan disebut siap dipanen.

Pengungkapan kebun ganja tersebut bermula dari penangkapan AS di wilayah Kota Bandung. Saat digeledah, polisi menemukan beberapa linting ganja yang dikuasai pria tersebut. Pemeriksaan kemudian mengarah pada pengakuan bahwa AS menanam ganja di rumahnya sendiri.

Kasat Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliestha Ageng Wicaksana mengatakan polisi menemukan tanaman ganja dengan ukuran beragam di taman belakang rumah yang luasnya sekitar 2 x 1 meter. Area tersebut ditutup menggunakan terpal jaring sehingga keberadaan tanaman tidak mudah terlihat dari luar.

"Rata-rata tingginya kurang lebih 180 centimeter," kata Oliestha saat memimpin penggeledahan di rumah AS, Jumat (18/9).

Dari 73 tanaman yang ditemukan, 28 pohon memiliki tinggi 3-9 sentimeter. Sebanyak tujuh pohon berukuran 91-172 sentimeter, 28 pohon mencapai sekitar 180 sentimeter, sedangkan delapan pohon lainnya telah berumur lima bulan dan siap panen. AS mengaku mulai menanam ganja sejak Mei 2026.

Polisi juga menemukan fakta bahwa rumah tersebut di-

tempati AS bersama anak dan istrinya. Berdasarkan pemeriksaan sementara, keduanya mengetahui keberadaan kebun ganja tersebut, tetapi AS disebut memaksa mereka merahasiakannya. Ketika polisi melakukan penggeledahan, anak dan istrinya terlihat menangis di dalam rumah tipe 36 tersebut.

AS yang berstatus PPPK Kementerian Pekerjaan Umum di Kota Bandung mengaku mempelajari teknik menanam ganja melalui media sosial. Ia awalnya memperoleh bibit dari seorang teman karena mengaku kesulitan mendapatkan ganja untuk dikonsumsi.

"Awalnya sebelumnya konsumsinya tuh beli susah, saya kan susah juga, takut juga. Terus saya penasaran juga bagaimana cara menanamnya," ujar AS.

Kepada penyidik, AS mengatakan hasil budidaya tersebut terutama digunakan untuk konsumsi pribadi. Sebagian hasil panen juga disebut diberikan kepada beberapa teman kerjanya. Namun, polisi masih mendalami dugaan adanya aktivitas jual-beli ganja tersebut.

Selain perkara budidaya ganja, pemeriksaan urine terhadap AS menunjukkan hasil positif mengonsumsi sabu-sabu. Polisi masih menelusuri asal bibit dan pupuk yang digunakan untuk membudidayakan

tanaman tersebut.

Atas kasus itu, polisi menjerat AS dengan Pasal 114 dan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Polisi menyebut ancaman pidananya enam tahun hingga maksimal 20 tahun penjara. UU tersebut ditetapkan pada 12 Oktober 2009 dan menjadi dasar hukum utama penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia.

Secara historis, penguatan kebijakan narkotika Indonesia telah berlangsung sejak pemerintah membentuk cikal bakal koordinasi penanggulangan narkoba pada 1971. BNN kemudian memperoleh dasar kelembagaan yang lebih kuat melalui perkembangan regulasi, hingga UU Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika kepada BNN.

Pengaturan ganja juga tidak hanya berlaku dalam hukum nasional. Di tingkat internasional, ganja telah menjadi bagian dari rezim pengendalian narkotika melalui Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Konvensi tersebut memasukkan cannabis dalam sistem pengawasan internasional dan mendefinisikan tanaman cannabis serta budidayanya dalam kerangka pengendalian narkotika. (*)

Prestasi Akademik, Tiga Siswa MIN 1 Baubau Lolos OMI Provinsi

mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara bertahap. Tahun ini, puluhan siswa kelas V dan VI mengikuti seleksi internal sebelum madrasah menetapkan tiga peserta terbaik berdasarkan hasil seleksi.

“Pembinaan kami lakukan di luar jam efektif mengajar setiap hari hingga seleksi tingkat kota. OMI ini modelnya berbeda dengan KSM, jadi dua tahun terakhir ini kami lebih dulu membangun mental bertanding para siswa,” kata Delisa.

Menurut Deli-

sa, setelah mental bertanding siswa terbentuk, pembinaan dilanjutkan dengan pendalaman materi berdasarkan petunjuk teknis OMI. Persiapan juga diperkuat melalui kebiasaan belajar mandiri para siswa di rumah sehingga proses pembinaan tidak hanya berlangsung di lingkungan madrasah.

Kepala MIN 1 Baubau, Dra. Yuliana Donggi Hanas, M.Pd., mengapresiasi capaian tersebut sekaligus memberikan penghargaan kepada para guru pembimbing. Ia menilai prestasi tiga siswa itu menjadi buah dari ketekunan siswa

dan pendampingan pendidik yang dilakukan secara konsisten.

“Saya menyampaikan rasa syukur, terima kasih, serta kebanggaan mendalam kepada para siswa yang telah berjuang mengharumkan nama madrasah. Keberhasilan ini bukan hal yang mudah, melainkan buah dari kerja keras, ketekunan, dan semangat belajar yang tinggi setiap hari,” ujar Yuliana, Senin (14/9/2026).

OMI menjadi bagian dari perkembangan tradisi kompetisi akademik di lingkungan pendidikan madrasah Indonesia. Sebelumnya, kompetisi

akademik madrasah juga dikenal melalui Kompetisi Sains Madrasah (KSM), yang menjadi wadah bagi peserta didik madrasah untuk berkompetisi di bidang sains. Secara lebih luas, tradisi olimpiade pelajar berkembang secara internasional melalui berbagai kompetisi, termasuk International Mathematical Olympiad (IMO) yang pertama kali diselenggarakan pada 1959. Ketiga siswa MIN 1 Baubau kini bersiap membawa prestasi tersebut ke tingkat Provinsi dengan dukungan guru dan seluruh warga madrasah.(*)

Pendidikan, Jalan dan PJU Jadi Aspirasi Warga Waliabuku dalam Reses Anggota DPRD Baubau Aswan Syaifudin

Secara historis, reses merupakan bagian dari mekanisme hubungan antara lembaga perwakilan dan masyarakat. Dalam sistem parlemen Indonesia, kegiatan reses digunakan untuk menyerap aspirasi konstituen di daerah pemilihan. DPR RI menjelaskan bahwa reses juga berkaitan dengan pelaksanaan fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.

Aswan mengingat-

kan bahwa DPRD bukan lembaga eksekutif yang menjalankan langsung seluruh program pembangunan. Peran DPRD adalah menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, termasuk menyampaikan serta mengawal aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. “Kami ini bukan eksekutif. Kami adalah menampung aspirasi masyarakat melalui kami untuk disampaikan ke pemerintah,” ujarnya.

Selain bidang pembangunan, ibu-ibu majelis taklim Waliabuku menyampaikan aspirasi keagamaan berupa permintaan pengadaan seragam. Aswan menyatakan usulan tersebut akan

diteruskan kepada pemerintah daerah, khususnya melalui bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Namun, ia belum dapat memastikan kapan seluruh aspirasi akan direalisasikan karena pelaksanaannya bergantung pada proses perencanaan, kewenangan pemerintah daerah, serta kemampuan anggaran.

“Kewajiban kami itu menyampaikan kepada pemerintah dan mengawal apa yang menjadi aspirasi masyarakat kami,” kata Aswan. Ia berharap berbagai kebutuhan yang disampaikan dalam reses tersebut dapat segera memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.(*)

Wakil Ketua II DPRD Buton Selatan Hasrul Saadi Harap Firman Hamza Lanjutkan Sinergi DPRD dan Pemda Busel Seperti Dilakukan La Ode Nurunani

Kami merasa nyaman bekerja sama dengan-nya,” kata Hasrul saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (14/9/2026).

Menurut Hasrul, posisi Sekretaris DPRD memang memiliki karakter khusus karena bersinggungan dengan kepentingan dua lembaga yang berbeda secara kelembagaan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menyebut Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Karena posisi tersebut, Hasrul menilai kemampuan menjaga keseimbangan komu-

nikasi menjadi penting. Ia mengatakan Nurunani selama ini mampu menjalankan fungsi tersebut dengan baik, sehingga pekerjaan DPRD dan pemerintah daerah dapat berjalan dalam koridor kepentingan masyarakat. “Dua lembaga itu memang berbeda, tapi tujuannya satu. Bagaimana kita sama-sama bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Pergantian pejabat itu, kata Hasrul, sebelumnya telah direncanakan melalui surat Bupati Buton Selatan mengenai usulan pergantian pejabat. Meski mengaku sempat terkejut dengan waktu pelaksanaannya, DPRD menghormati keputusan tersebut. “Saya sendiri pun kaget saat mendengarnya. Tapi siapa pun yang ditunjuk, kami tidak memperlmasalahkannya. Yang terpenting bagi kami adalah bagaima-

na menjaga sinergi dan menjembatani kepentingan masyarakat, DPRD, dan Pemerintah Daerah,” katanya.

Secara historis, kebutuhan terhadap sekretariat yang mendukung kerja lembaga perwakilan daerah telah menjadi bagian dari perkembangan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Pengaturan kelembagaan tersebut kemudian diperinci dalam kerangka penataan perangkat daerah, salah satunya melalui PP Nomor 18 Tahun 2016. Regulasi itu menegaskan bahwa sekretariat DPRD bukan sekadar unit administrasi, melainkan perangkat yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD.

Dalam konteks pergantian di Buton Selatan, Hasrul berharap La Ode Firman Hamza dapat melanjutkan pola komunikasi yang

telah terbangun sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat. “Harapan kami, semoga pejabat yang baru bisa menjembatani kepentingan DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diharapkan. Semoga kinerjanya lebih baik lagi dari sebelumnya,” tuturnya.

La Ode Nurunani dan La Ode Firman Hamza merupakan dua pejabat yang terlibat dalam pergantian tersebut dan dilantik bersamaan dalam Apel Gabungan ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Pergantian ini menjadi bagian dari dinamika administrasi pemerintahan daerah, sementara fungsi utama Sekretariat DPRD tetap diarahkan untuk memastikan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas-tugas DPRD berjalan berkesinambungan.(*)

Bapas Baubau Perkuat Bimbingan Klien Wajib Lapor untuk Cegah Pelanggaran

mandiri serta membangun kembali hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya.

“Pembimbingan saat klien wajib lapor bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bentuk pendampingan mental agar klien benar-benar siap mandiri dan diterima kembali oleh masyarakat secara utuh,” ujar Jamaluddin.

Dalam kesempatan itu, klien juga diingatkan untuk menjaga sikap, menjunjung norma yang berlaku, dan mematuhi aturan di tengah masyarakat. Mereka didorong mengembangkan aktivitas yang positif serta menjauhi situasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum baru.

Salah seorang klien, LS, mengatakan dirin-

ya berupaya menjalani kehidupan dengan bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. “Sebagai nelayan, sehari-hari kegiatan saya hanya melaut untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga,” ujar LS.

Pembimbingan dan reintegrasi sosial merupakan bagian dari perkembangan sistem pemasyarakatan Indonesia yang sejak perubahan paradigma pemasyarakatan menempatkan pembinaan dan pengembalian warga binaan ke masyarakat sebagai bagian penting proses pemasyarakatan. Secara historis, konsep tersebut berkembang dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan setelah lahirnya gagasan pe-

masyarakatan pada 1960-an dan kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Perkembangan serupa juga terlihat secara internasional, ketika pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi semakin menjadi bagian dari kebijakan pemasyarakatan di berbagai negara.

Bapas Baubau menilai dukungan keluarga dan penerimaan masyarakat berperan penting dalam keberhasilan reintegrasi klien. Sinergi antara petugas pemasyarakatan, klien, keluarga, dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi stigma, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta mendukung keamanan dan ketertiban sosial.(*)

Buton Tengah Siapkan Nomor 112, Respons Kegawatdaruratan Didorong Lebih Cepat

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Aula Bappeda Buton Tengah, Kamis (17/9/2026), dengan melibatkan sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan penanganan keadaan darurat.

Layanan 112 dirancang agar masyarakat tidak perlu mengingat banyak nomor ketika menghadapi keadaan darurat. Laporan yang masuk akan dikonsolidasikan pemerintah daerah, diverifikasi, kemudian diteruskan

kepada perangkat atau instansi yang sesuai dengan jenis kejadian, seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Damkar, Satpol PP, kepolisian, dan unsur pendukung lainnya.

Ketua Tim Fasilitasi Sistem Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (PMPB), Early Warning System dan Layanan 112 Komdigi, Agung Setio Utomo, menjelaskan bahwa NTPD 112 merupakan bagian dari penataan nomor telekomunikasi darurat menuju kon-

sep Indonesia Single Emergency Number. “Layanan 112 merupakan bagian dari penataan nomor telekomunikasi darurat menuju konsep Indonesia Single Emergency Number,” kata Agung dalam sosialisasi tersebut.

Di Buton Tengah, implementasi layanan itu membutuhkan mekanisme kerja lintas sektor, mulai dari penerimaan panggilan, verifikasi informasi, penentuan jenis kedaruratan, hingga pengeralahan petugas.

Pola tersebut ditujukan untuk mengurangi waktu koordinasi ketika masyarakat menghadapi kecelakaan, bencana, kebakaran, gangguan kesehatan, atau situasi lain yang membutuhkan pertolongan segera.

Sosialisasi digelar secara hibrida melalui Zoom Meeting dan diikuti tujuh kabupaten dari empat provinsi, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara. Dari Buton Tengah, kegiatan dihadiri Staf

berkembang sebagai mekanisme panggilan darurat daerah yang menghubungkan masyarakat dengan layanan penanganan kedaruratan.

Konsep nomor darurat tunggal juga telah lama digunakan di sejumlah negara. Amerika Serikat, misalnya, mengembangkan nomor 911 sejak 1968 sebagai akses tunggal untuk layanan kepolisian, pemadam kebakaran, dan medis. Di Uni Eropa, nomor 112 mulai diperkenalkan pada 1991 dan kemudian menjadi nomor panggilan darurat yang dapat digunakan di negara-negara ang-

gota Uni Eropa. Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya integrasi komunikasi dengan sistem respons lapangan agar panggilan darurat tidak berhenti pada penerimaan laporan.

Bagi Buton Tengah, penerapan NTPD 112 diharapkan memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus memperpendek waktu respons terhadap kejadian darurat. Layanan tersebut dapat diakses masyarakat tanpa pulsa dan diarahkan menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif, inklusif, serta berkelanjutan.(*)

Buka Jambore PKK Baubau 2026, Wali Kota Yusran Fahim Dorong Kader Perkuat Inovasi



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, S.E., mendorong kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) meningkatkan kreativitas, inovasi, dan pengabdian dalam memperkuat kesejahteraan keluarga. Pesan itu disampaikan saat membuka Jambore PKK Tingkat Kota Baubau Tahun 2026 di Halaman Kantor Wali Kota Baubau, Sabtu (12/9/2026).

Yusran berharap jambore tersebut menjadi ruang bagi kader untuk mempererat silaturahmi, membangun kekompakan, serta meningkatkan kapasitas dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

"Jambore PKK bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan momentum penting untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan kreativitas, membangun kekompakan, serta memperkuat pengabdian kader di tengah masyarakat," kata Yusran dalam sambutannya.

Ia menekankan

pentingnya peran keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah. Keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera dinilai menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Untuk memperkuat peran tersebut, Yusran mengimbau Tim Penggerak PKK di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan agar terus mendampingi kader dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK. Pendampingan juga diharapkan melibatkan camat dan lurah agar program dapat diterapkan secara kreatif dan inovatif sesuai kebutuhan warga.

Kepada peserta, Yusran meminta agar setiap perlombaan diikuti dengan menjunjung sportivitas, kebersamaan, dan persahabatan. Menurut dia, nilai penting jambore tidak hanya terletak pada hasil kompetisi, tetapi juga pada pengalaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Jangan hanya mengejar kemenangan. Yang paling ut-

ma adalah pengalaman, kebersamaan, dan semangat yang bisa dibawa pulang untuk diterapkan di lingkungan keluarga masing-masing," ujarnya.

Ia menambahkan, kemenangan dalam perlombaan merupakan prestasi, sedangkan kebersamaan menjadi nilai yang dapat dirasakan seluruh peserta. Karena itu, kegiatan jambore diharapkan memperkuat hubungan antarkader sekaligus menumbuhkan semangat untuk terus berkontribusi di lingkungan masing-masing.

Yusran juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK se-Kota Baubau atas pengabdian mereka sebagai mitra strategis pemerintah. Peran kader dinilai penting dalam mendukung berbagai upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Gerakan PKK di Indonesia memiliki sejarah panjang. Gerakan ini berawal dari upaya pendidikan kesejahteraan keluarga pada 1957 di Bogor, Jawa Barat, yang kemudi-

an berkembang menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan keluarga sebagai sasaran utama. Dalam perkembangannya, PKK menjadi mitra pemerintah dalam berbagai bidang pembangunan keluarga.

Secara internasional, pemberdayaan keluarga dan partisipasi perempuan juga menjadi bagian dari agenda pembangunan, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015. Agenda tersebut mencakup penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan, serta kesetaraan gender.

Melalui Jambore PKK 2026, Yusran berharap semangat dan kemampuan kader semakin berkembang sehingga pelaksanaan program pemberdayaan keluarga di Kota Baubau dapat berjalan lebih efektif, kreatif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. (*)

Jambore PKK Baubau 2026 Perkuat Kader, Sitti Aryati Tegaskan Dukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas



Laporan: Andina

BAUBAU, BP-Penguatan kapasitas kader dan pemberdayaan keluarga menjadi fokus Jambore PKK Tingkat Kota Baubau Tahun 2026 yang dibuka Ketua TP PKK Kota Baubau, Hj. Sitti Aryati Yusran, di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Sabtu (12/9/2026). Kegiatan ini mengusung tema nasional "Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045".

Jambore tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, menyatukan persepsi, serta meningkatkan kemampuan kader dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga. Keluarga dipandang sebagai fondasi penting dalam membentuk generasi masa depan yang unggul, sehat, dan berdaya saing.

Sitti Aryati mengatakan, TP PKK merupakan mitra strategis Pemerintah Kota Baubau karena kadernya berinteraksi langsung dengan masyarakat. Peran tersebut dinilai penting untuk membantu memastikan program pembangunan menjangkau keluarga hingga lapisan masyarakat paling bawah.

"Tanpa kerja keras, keikhlasan, dan semangat gotong royong para kader, pro-

gram pembangunan pemerintah tidak akan menyentuh lapisan masyarakat paling bawah," ujarnya.

Ia menegaskan, Jambore PKK tidak semestinya dipandang hanya sebagai kegiatan perlombaan atau seremoni. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan kapasitas kader agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ketua TP PKK Baubau itu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader atas pengabdian dan kerja tulus mereka selama ini. Kontribusi kader, menurut dia, menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program-program PKK di tengah masyarakat.

Dalam arahnya, Sitti Aryati mengingatkan seluruh peserta agar menjaga sportivitas dan kebersamaan selama kegiatan berlangsung. Ia menilai semangat persatuan merupakan nilai yang perlu terus dipelihara dalam setiap aktivitas organisasi.

"Momentum Jambore ini bukan sekadar ajang perlombaan atau seremonial belaka, melainkan wadah memupuk kebersamaan, menyatukan persepsi, serta meningkatkan kapasitas kader agar terus memberikan manfaat nyata," katan-

ya. Penguatan 10 Program Pokok PKK dalam jambore ini juga berkaitan dengan agenda pembangunan keluarga di Indonesia. Gerakan PKK secara nasional berakar pada program pendidikan dan kesejahteraan keluarga yang berkembang sejak era 1950-an, sebelum kemudian diperluas menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.

Secara internasional, pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat juga sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015. Agenda tersebut mencakup penghapusan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, serta kesetaraan gender.

Melalui Jambore PKK 2026, TP PKK Kota Baubau diharapkan semakin memperkuat peran kader dalam pemberdayaan keluarga dan mendukung pelaksanaan agenda pembangunan daerah, sekaligus berkontribusi terhadap cita-cita Indonesia Emas 2045. (*)